



Maksimalkan Pengawasan Internal

Dinzin Jadi Contoh Penerapan SPIP

JOGJA - Pemkot Jogja kembali menjadi proyek percontohan. Kali ini Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja yang terpilih menjadi proyek rintisan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Sistem itu merupakan sistem pengawasan yang langsung menghubungkan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jogjakarta. Untuk menghubungkan pengawasan tersebut, di Kota Jogja telah terbentuk satuan tugas yang terhubung langsung dari pemkot ke BPKP.

"Proses pengawasan internal di Kota Jogja sudah berjalan dengan baik. Ini dengan dibuktikan hasil penilaian BPK opini wajar tanpa pengecualian," ujar Kepala Perwakilan BPKP Jogjakarta Condro Imantoro di sela peluncuran SPIP di Balai Kota Jogja kemarin (26/6).

Dia mengungkapkan, pengawasan berbasis SPIP tersebut telah terjalin dengan bekerja sama Bank Dunia. Mereka akan melihat langsung proses pengawasan di pemerintah daerah. "Kami selaku instansi pembina dan kerja sama dengan World Bank untuk menjadikan penerapan SPIP di Kota Jogja sebagai contoh. Harapannya, bisa menjadi *best practice* bagi daerah lain," imbuhnya.

Proses percontohan ini akan berlangsung selama satu tahun setelah itu, BPKP hanya melakukan bimbingan dan memfasilitasi saja. "Meski targetnya satu tahun, namun dalam jangka waktu dua bulan sudah bisa berjalan dengan sinergis," harapnya.

Usai pelaksanaan proyek rintisan berjalan setahun, Dinzin bakal menjadi percontohan. Kabupaten lain di DIJ bakal meniru proses SPIP yang terlaksana di Dinzin Kota Jogja.

Wakil Wali Kota Imam Priyono mengatakan, ada dua pilihan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemkot. Selain Dinzin, ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogja.

"Tapi, akhirnya ditetapkan sebagai pelaksana proyek rintisan SPIP adalah di dinas perizinan karena berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat serta perkembangan perekonomian di Jogja," katanya.

Imam berharap pelaksanaan proyek rintisan di Dinzin tersebut bisa memengaruhi pelaksanaan SPIP di satuan kerja perangkat daerah lain. "Maksimal dalam waktu dua tahun mendatang pelaksanaan SPIP di seluruh satuan kerja perangkat daerah bisa optimal," terangnya.

Dengan pelaksanaan SPIP yang optimal, dia berharap temuan yang sifatnya administratif akan semakin kecil atau bahkan sama sekali tidak ada. "Efisiensi dan efektivitas akan terjaga karena ada parameter yang jelas," lanjutnya. (eri/amd)



Condro Imantoro

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005